



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1163, 2021

KEMENDES-PDPT. Keamanan. Hak Akses Arsip
Dinamis. Sistem Klasifikasi. Perubahan.

PERATURAN MENTERI

DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TER TINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 14 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN HAK AKSES ARSIP DINAMIS
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung penerapan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Hak Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Hak Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

- b. bahwa Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Hak Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Hak Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Hak Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
 5. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 192);
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Hak Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 369) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Hak Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 875);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1256);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN

DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN HAK AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI.

Pasal I

Ketentuan Lampiran Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Hak Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 369) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Hak Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 875) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 2021

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDUL HALIM ISKANDAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Oktober 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR .14. TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 2
TAHUN 2017 TENTANG SISTEM KLASIFIKASI
KEAMANAN DAN HAK AKSES ARSIP DINAMIS
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI

SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN HAK AKSES ARSIP DINAMIS DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

SISTEMATIKA

BAB I PENDAHULUAN

- A Latar Belakang
- B Ruang Lingkup
- C Pengertian
- D Asas
- E Pengorganisasian
- F Sarana dan Prasarana
- G Sumber Daya Manusia

BAB II KLASIFIKASI KEAMANAN ARSIP DINAMIS

- A Ruang Lingkup
- B Klasifikasi Keamanan
- C Pengamanan Fisik dan Informasi Arsip

BAB III KLASIFIKASI AKSES ARSIP

BAB IV DAFTAR ARSIP BERDASARKAN KLASIFIKASI KEAMANAN DAN
AKSES ARSIP DINAMIS

BAB V PENUTUP

BAB I PENDAHULUAN

A Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah mengubah paradigma Bangsa Indonesia terhadap informasi arsip dinamis yang semula tertutup untuk publik menjadi terbuka walaupun ada sebagian informasi dikecualikan atau tertutup. Undang-undang tersebut juga menjadi landasan penting terbitnya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

Dalam Pasal 40 ayat (4) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyebutkan bahwa untuk mendukung pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan efisien, pencipta arsip membuat tata naskah dinas, klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip, serta sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip. Dengan demikian, setiap pencipta arsip diwajibkan untuk membuat dokumen tersebut.

Dokumen klasifikasi keamanan dan hak akses arsip digunakan sebagai dasar dalam memberikan layanan informasi publik secara cermat terhadap jenis-jenis informasi arsip sehingga dapat menjamin keamanan dan akuntabilitas informasinya. Oleh karena itu, penyusunan klasifikasi pengamanan dan akses arsip di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mendesak untuk dilaksanakan dan dibakukan.

Melalui Klasifikasi Pengamanan dan Akses Arsip di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, diharapkan layanan informasi arsip bagi publik di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dapat terlaksana secara benar dan efektif tanpa ada pihak-pihak yang dirugikan.

B Ruang Lingkup

Ruang lingkup klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mencakup:

1. Klasifikasi Keamanan Arsip: memuat informasi biasa, terbatas, dan rahasia; dan

2. Klasifikasi dan Pengaturan Akses Arsip: memuat pengguna internal dan pengguna eksternal.

C. Pengertian

1. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga Negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.
2. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi selama jangka waktu tertentu.
3. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis, dalam hal ini Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
4. Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya, dalam hal ini unit kerja Pimpinan Tinggi Utama, Pimpinan Tinggi Madya, dan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
5. Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan.
6. Akses Arsip adalah ketersediaan arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otorisasi legal serta keberadaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan arsip.
7. Klasifikasi adalah proses identifikasi kategori-kategori kegiatan dan arsip dinamis yang dihasilkan serta pengelompokannya.
8. Klasifikasi Keamanan Arsip adalah kategori kerahasiaan informasi arsip berdasarkan pada tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkannya terhadap kepentingan dan keamanan negara, masyarakat dan perorangan.
9. Klasifikasi Akses Arsip adalah kategori pembatasan akses terhadap arsip berdasarkan kewenangan penggunaan arsip terkait dengan

pelaksanaan tugas dan fungsi tertentu.

10. Kategori Arsip adalah kategori jenis arsip berdasarkan substantif dan fasilitatif sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi.
11. Pengamanan Arsip adalah program perlindungan fisik dan informasi arsip berdasarkan klasifikasi keamanannya.
12. Biasa adalah arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh orang banyak tidak merugikan siapapun.
13. Terbatas adalah arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintah.
14. Rahasia adalah arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.
15. Penggunaan Arsip adalah kegiatan pemanfaatan/penyediaan arsip bagi kepentingan pengguna arsip yang berhak.
16. Pengguna Internal adalah pengguna arsip yang berasal dari lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
17. Pengguna Eksternal adalah pengguna arsip yang berasal dari luar Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
18. Prosedur Pengaksesan Informasi Publik adalah tata cara atau aturan ketersediaan informasi sesuai kewenangan hukum dan otorisasi legal pemanfaatan informasi publik.
19. Pejabat Pengelola Informasi Publik adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyediaan dan/atau pelayanan informasi di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

D. Asas

Klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dilaksanakan dengan menerapkan asas gabungan yaitu sentralisasi dalam penetapan kebijakan dan desentralisasi dalam pelaksanaan di lapangan. Penetapan kebijakan dalam klasifikasi dan akses arsip dinamis di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

meliputi penyusunan dan penerapan pedoman serta *standard operating procedure* atau prosedur operasional standar, sumber daya manusia, sarana dan prasarana.

E. Pengorganisasian

Klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Arsip yang tercipta di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dapat diklasifikasikan menjadi informasi biasa, terbatas, dan rahasia.
2. Ketiga klasifikasi tersebut berbeda dalam teknis pengamanannya. Semakin tinggi tingkat klasifikasi informasinya semakin tinggi pula tingkat pengamanannya.
3. Ketiga klasifikasi tersebut berbeda dalam pengaturan aksesnya. Semakin tinggi tingkat klasifikasi informasinya semakin ketat pula dalam pengaturan aksesnya.
4. Setiap pegawai Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi hanya dapat mengakses arsip yang berada pada tanggungjawab tugas dan kewenangannya.
5. Publik dapat mengakses informasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang dikategorikan terbuka sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.

F. Sarana dan Prasarana

1. Sarana penyimpanan arsip konvensional berupa rak statis untuk arsip biasa, *filig cabinet* untuk arsip terbatas, dan brankas atau lemari besi untuk arsip rahasia. Untuk arsip elektronik juga perlu ditentukan kualitas dan tingkat keamanan *hardware* dan *software* yang diadakan.
2. Prasarana berupa ruang penyimpanan yang representatif sesuai dengan tingkatan klasifikasi informasi.

I. Sumber Daya Manusia

Pejabat Fungsional Arsiparis dan atau petugas pengolah arsip yang bertugas mengelola arsip harus dipilih pegawai yang profesional baik dalam substansi kearsipan maupun dalam dedikasi dan integritas. Pengelola arsip tersebut harus ditetapkan melalui surat keputusan yang dikeluarkan serendah-rendahnya oleh Pimpinan Tinggi Pratama,

BAB II KLASIFIKASI KEAMANAN ARSIP DINAMIS

A. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis meliputi:

1. klasifikasi keamanan; dan
2. pengamanan fisik dan informasi arsip.

B. Klasifikasi Keamanan

Arsip dinamis merupakan rekaman informasi yang disimpan untuk digunakan. Kerahasiaan/ketertutupan dan keterbukaan arsip berkaitan dengan hak dan kewenangan seseorang, lembaga, atau organisasi untuk memperoleh informasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, kerahasiaan/ketertutupan dan keterbukaan arsip menyangkut kewajiban suatu pihak untuk merahasiakan informasi tertentu kepada orang yang tidak berhak. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengaturan terhadap akses arsip dinamis. Berdasarkan ketentuan umum yang telah dibahas, arsip dinamis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi terbagi menjadi beberapa kategori, yaitu:

1. Arsip berklasifikasi Biasa, arsip dinamis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang termasuk ke dalam kategori arsip umum merupakan arsip yang apabila dibuka untuk umum tidak membawa dampak apapun terhadap keamanan Negara.
2. Arsip berklasifikasi Terbatas, Arsip dinamis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang termasuk ke dalam kategori arsip terbatas merupakan arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
3. Arsip berklasifikasi Rahasia, arsip dinamis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang termasuk ke dalam kategori arsip Rahasia apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan Negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro. Apabila informasi yang terdapat

dalam arsip bersifat sensitif bagi lembaga/organisasi akan menimbulkan kerugian yang serius terhadap *privacy*, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi.

Pengamanan arsip sebagaimana telah dijelaskan di atas dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

NO.	TINGKAT KLASIFIKASI KEAMANAN	MEDIA ARSIP					
		ARSIP KONVENSIONAL			ARSIP ELEKTRONIK		
		ARSIP	PENGUNA	PRASARANA DAN SARANA	ARSIP	PENGUNA	PRASARANA DAN SARANA
1	Biasa	Tidak ada persyaratan dan prosedur khusus	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memerlukan prasarana dan sarana khusus	Back-up secara teratur untuk tujuan pemulihan sistem dalam rangka menjamin autentistas arsip	Pengguna yang berasal dari Eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memerlukan prasarana dan sarana khusus
2	Terbatas	Ada persyaratan dan prosedur dengan memberikan cap "TERBATAS" pada fisik arsip	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas internal dan	Diperlukan tempat penyimpanan yang aman	1. Back-up secara teratur untuk tujuan pemulihan sistem dalam	1. Autentikasi pengguna (nama penggun/ password atau ID	1. Autentikasi server 2. Langkah- langkah keamanan dengan Operating System khusus atau aplikasi khusus.

MEDIA ARSIP							
NO.	TINGKAT KLASIFIKASI KEAMANAN	ARSIP KONVENSIONAL			ARSIP ELEKTRONIK		
		ARSIP	PENGUNA	PRASARANA DAN SARANA	ARSIP	PENGUNA	PRASARANA DAN SARANA
			eksternal serta penegak hukum		rangka menjamin autentisitas arsip. 2. <i>File-file</i> elektronik (termasuk <i>data base</i>) harus di lindungi terhadap penggunaan internal atau oleh pihak- pihak eksternal	digital). 2. Penggunaan untuk <i>log in</i> pada tingkat individual	3. <i>Firewall</i> dan sistem-sistem serta prosedur prosedur deteksi terhadap intrusi

MEDIA ARSIP							
NO.	TINGKAT KLASIFIKASI KEAMANAN	ARSIP KONVENSIONAL			ARSIP ELEKTRONIK		
		ARSIP	PENGUNA	PRASARANA DAN SARANA	ARSIP	PENGUNA	PRASARANA DAN SARANA
3	Rahasia	1. Ada persyaratan dan prosedur rahasia dengan memberikan cap "RAHASIA" pada fisik arsip. 2. Tidak sembarangan meletakkan arsip/ dokumen yang bersifat	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Lokasi aman dengan akses yang terbatas	1. <i>Back-up</i> secara teratur untuk tujuan pemulihan sistem dalam rangka menjamin autentisitas arsip. 2. <i>File-file</i> elektronik (termasuk <i>data base</i>) harus dilindungi terhadap penggunaan	1. Hanya staf yang ditunjuk oleh Kepala BIG atau organisasi dan tingkat di atasnya yang dapat mengakses arsip tersebut. 2. Autentikasi Pengguna (nama pengguna/	1. Langkah-langkah keamanan dengan <i>Operating System</i> khusus/aplikasi khusus 2. <i>Firewall</i> serta sistem-sistem dan prosedur

MEDIA ARSIP						
NO.	TINGKAT KLASIFIKASI KEAMANAN	ARSIP KONVENSIONAL			ARSIP ELEKTRONIK	
		ARSIP	PENGUNA	PRASARANA DAN SARANA	ARSIP	PENGUNA
		rahasia			internal atau oleh pihak- pihak eksternal	<i>password</i> atau ID digital) 3. Penggunaan untuk <i>log in</i> pada tingkat individual
						deteksi terhadap intruksi.

C. Pengamanan Fisik dan Informasi Arsip

Pengamanan Fisik dan Informasi Arsip dilaksanakan melalui:

1. Pengamanan Ruang Simpan Arsip

Pengamanan ruang simpan secara keseluruhan mencakup fasilitas pengamanan seperti pemasangan kamera pengawas (*CCTV*), kunci pengamanan ruangan, dan media simpan arsip (arsip kategori umum disimpan pada rak besi, arsip kategori terbatas di simpan pada *filig cabinet*, dan arsip kategori rahasia di simpan pada lemari besi).

2. Penentuan Pengelola Arsip

Pengelola arsip yang dimaksud meliputi Pejabat Fungsional Arsiparis di Unit Kearsipan dan di Unit Pengolah. Pengelola arsip inaktif sangat berperan dalam pengamanan arsip di *Records Centre* (Pusat Arsip) sehingga penetapan hak akses arsip dapat berjalan optimal. Arsiparis dan atau penata arsip aktif mempunyai wewenang dan tanggung jawab mengelola arsip di unit pengolah.

3. Penciptaan Daftar Arsip Terbatas dan Arsip Rahasia

Penciptaan daftar arsip terbatas dan daftar arsip rahasia termasuk kedalam pengamanan informasi arsip. Tujuannya sebagai acuan pembatasan akses yang digunakan oleh penyedia informasi yang berada di *Records Centre* dan unit pengolah.

BAB III

KLASIFIKASI AKSES ARSIP

Berdasarkan klasifikasi keamanan yang telah diatur di bab sebelumnya, dapat ditentukan hak akses bagi pengguna yang berhak untuk mengakses arsip dinamis. Pengguna yang diberikan hak akses, terdiri dari 2 (dua) golongan yaitu pengguna yang ada di lingkungan internal instansi dan pengguna dari lingkungan eksternal instansi. Penggolongan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengguna yang berhak di lingkungan internal instansi.
 - a. Penentu kebijakan yang mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip yang berada di bawah kewenangannya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pimpinan tingkat tertinggi, yaitu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip yang berada dibawah kewenangannya,
 - 2) Pimpinan tingkat tinggi (satu tingkat di bawah pimpinan level tertinggi), yaitu Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang mempunyai kewenangan untuk mengakses arsip di bawah kewenangannya, namun tidak diberikan hak akses untuk informasi yang terdapat pada pimpinan level tertinggi dan yang satu level dengan unit di luar unit kerjanya, kecuali telah mendapatkan izin.
 - 3) Pimpinan tingkat menengah (satu tingkat di bawah pimpinan level tinggi), yaitu Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator yang mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip di bawah kewenangannya, namun tidak diberikan hak akses untuk informasi yang terdapat pada pimpinan level tertinggi, pimpinan level tinggi, dan yang satu level di luar unit kerjanya kecuali telah mendapatkan izin.
 - b. Pelaksana Kebijakan, yaitu Pejabat Struktural, Arsiparis, dan Pegawai yang mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip yang berada di bawah kewenangannya dengan tingkat klasifikasi biasa, tetapi tidak diberikan hak akses untuk arsip dengan tingkat klasifikasi terbatas, dan rahasia yang terdapat pada pimpinan tingkat tertinggi, pimpinan tingkat tinggi, pimpinan level

menengah, dan yang satu tingkat di atas unit kerjanya kecuali telah mendapatkan izin.

- c. Pengawas internal mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip pada pencipta arsip dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat.
2. Pengguna yang berhak di lingkungan eksternal
- a. Publik mempunyai hak untuk mengakses seluruh arsip dengan kategori biasa/terbuka.
 - b. Pengawas eksternal mempunyai hak untuk mengakses seluruh arsip pada pencipta arsip dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti pengawasan yang dilakukan oleh instansi yang berwenang seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam proses mengaudit.
 - c. Aparat penegak hukum mempunyai hak untuk mengakses arsip pada pencipta arsip yang terkait dengan perkara atau proses hukum yang sedang ditanganinya dalam rangka melaksanakan fungsi penegakan hukum, contohnya ketika pihak penegak hukum sedang menangani tindak pidana masalah korupsi.

BAB IV
DAFTAR ARSIP BERDASARKAN KLASIFIKASI KEAMANAN DAN
HAK AKSES ARSIP DINAMIS

I. FASILITATIF

No	Kode Arsip (Primer, Sekunder, Tersier)	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	KEU	KEUANGAN	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	Biro Keuangan dan BMN
	KEU.00	Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/APBN-P				
	KEU.00.01	Ketetapan Pagu Indikatif/Sementara				
	KEU.00.02	Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi dengan Komisi DPR-RI				
	KEU.00.03	Risalah Rapat Dengar Pendapat dengan DPR-RI				
	KEU.00.04	Ketetapan Pagu Definitif				
	KEU.00.05	Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)				
	KEU.00.06	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Termasuk Revisinya				

No	Kode Arsip (Primer, Sekunder, Tersier)	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
	KEU.01	Pelaksanaan Anggaran	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	Biro Keuangan dan BMN
	KEU.01.01	Ketentuan/Peraturan yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan penatausahaan dan pertanggungjawaban anggaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi				
	KEU.01.02	Laporan Realisasi Pendapatan Negara dari Masing-masing Saker	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	Biro Keuangan dan BMN
	KEU.01.03	Laporan Pelaksanaan Anggaran				
	KEU.02	Belanja				
	KEU.02.01	Surat Penyedia Dana (SPP-UP, SPP-TUP, SPP-GU)				
	KEU.02.02	Dokumen Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	Biro Keuangan dan BMN
	KEU.02.03	Pembukuan Anggaran				
	KEU.02.04	Laporan Perkembangan Realisasi Penerimaan, Realisasi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal				

No	Kode Arsip (Primer, Sekunder, Tersier)	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
	KEU.03	Bantuan / Pinjaman Luar Negeri	Biasa	Escelon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	Biro Keuangan dan BMN
	KEU.03.01	Permohonan Pinjaman Luar Negeri (Blue Book)				
	KEU.03.02	Dokumen Kesanggupan Negara Donor untuk Membiayai (Grey Book)				
	KEU.03.03	Dokumen <i>Memorandum Of Understanding</i> (MoU) dan Dokumen Sejenisnya				
	KEU.03.04	Dokumen <i>Loan Agreement</i> (PHLN)				
	KEU.03.05	Alokasi dan Relokasi Penggunaan Dana Luar Negeri				
	KEU.03.06	Aplikasi Penarikan Dana Bantuan Luar Negeri (BLN)				
	KEU.03.07	Otorisasi Penarikan Dana (<i>Payment Advice</i>)				
	KEU.03.08	Realisasi Pencairan Dana Bantuan Luar Negeri				
	KEU.03.09	Permintaan Penarikan Dana dari Negara Donor (Replenishment)				

No	Kode Arsip (Primer, Sekunder, Tersier)	Jenis Arsip		Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
	KEU.03.10		Laporan Kemajuan, Bulanan, dan Triwulan (<i>Report Progress, Monthly, dan Quarterly</i>)				
	KEU.03.11		Laporan Penyelesaian/Laporan Tahunan (<i>Completion Report/Annual Report</i>)				
	KEU.03.12		Ketentuan/Peraturan yang menyangkut Bantuan/ Pinjaman Luar Negeri di lingkungan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi				
	KEU.04		Pengelolaan APBN/Dana Pinjaman / Hibah Luar Negeri	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	Biro Keuangan dan BMN
	KEU.04.01		Keputusan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran termasuk Berita Acara Serah Terima Jabatan				
	KEU.04.02		Keputusan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi tentang Penetapan Kuasa Pengguna Barang/Jasa termasuk Berita Acara Serah Terima Jabatan				

No	Kode Arsip (Primer, Sekunder, Tersier)	Jenis Arsip		Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
	KEU.04.03		Keputusan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi tentang Penetapan Bendahara				
			Penerimaan/ Pengeluaran termasuk Berita Acara Serah Terima Jabatan.				
	KEU.04.04		Keputusan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi tentang Penetapan Pengelola Barang termasuk Berita Acara Serah Terima Barang				
	KEU.04.05		Keputusan Penetapan Pengelola Keuangan Kementerian/ Unit Kerja				
	KEU.04.06		Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar, Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan, dan Bendahara Pembantu termasuk Berita Acara Serah Terima Jabatan				

No	Kode Arsip (Primer, Sekunder, Tersier)	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
	KEU.05	Sistem Akuntansi Instansi (SAI)	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	Biro Keuangan dan BMN
	KEU.05.01	Berita Acara Rekonsiliasi (BAR)				
	KEU.05.02	Register Transaksi Harian (RTH), Dokumen Sumber (DS), Surat Tanda Setoran (STS), Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP), Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB), Surat Perintah Membayar (SPM)				
	KEU.05.03	Laporan Realisasi Bulanan SAI/Trivulan/ Semester	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	Biro Keuangan dan BMN
	KEU.06	Pertanggungjawaban Keuangan Negara				
	KEU.06.01	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia				
	KEU.06.02	Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan Internal oleh Inspektorat Jenderal				
	KEU.06.03	Laporan Aparat Pemeriksa Fungsional				
	KEU.06.04	Dokumen Penyelesaian Kerugian Keuangan Negara				
	KEU.06.05	Gagal Bayar				

No	Kode Arsip (Primer, Sekunder, Tersier)	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
	KEU.07	Akuntansi dan Pelaporan	Biasa	Escalon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	Biro Keuangan dan BMN
	KEU.07.01	Verifikasi dan Pembukuan				
	KEU.07.02	Akuntansi dan pelaporan keuangan (triwulan, semester, dan Tahunan)				
	KEU.08	Perbendaharaan dan penatausahaan keuangan	Biasa	Escalon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	Biro Keuangan dan BMN
	KEU.08.01	Daftar Gaji, Lembur dan Uang Makan				
	KEU.08.02	Kartu Gaji				
	KEU.08.03	Surat Setoran Pajak (SSP)				
	KEU.08.04	Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP)				
	KEU.08.05	Penerimaan Sisa Anggaran Lebih dan Saldo Kas atau Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB)				
	KEU.08.06	Bukti Setor Bunga dan atau Jasa Giro Bank				
	KEU.08.07	Laporan Kas				

No	Kode Arsip (Primer, Sekunder, Tersier)	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
	KEU.09	Barang Milik Negara (BMN)	Biasa	Escalon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	Biro Keuangan dan BMN
	KEU.09.01	Rencana Kebutuhan BMN				
	KEU.09.02	Inventarisasi BMN				
	KEU.09.03	Pengelolaan BMN				
	KEU.09.04	Penghapusan/hibah BMN				
	KEU.09.05	Berita Acara Serah Terima BMN				
	KEU.09.06	Laporan BMN				
	KEU.09.07	Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi BMN				
	KEU.09.08	Surat Teguran Kelalaian Pemanfaatan BMN	Biasa	Escalon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	Biro Keuangan dan BMN
	KEU.10	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)				
	KEU.10.01	Usulan Tarif PNBP				
	KEU.10.02	Kontrak/Perjanjian Sewa PNBP				
	KEU.10.03	Penagihan/Pengembalian PNBP				
	KEU.10.04	Prosedur Pengelolaan dan Pelaporan PNBP				
	KEU.10.05	Keringanan/Kecamatan Pembayaran PNBP				
	KEU.10.06	Pemeriksaan dan Pengawasan PNBP				
	KEU.10.07	Sanksi/Denda PNBP				

No	Kode Arsip (Primer, Sekunder, Tersier)	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
2	KPG	KEPEGAWAIAN				
	KPG.00	Formasi Pegawai	Biasa	Escelon II	Memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	Biro Kpegawaian dan Organisasi
	KPG.00.01	Usulan dari Unit Kerja				
	KPG.00.02	Usulan Permintaan Formasi kepada MenPan RB dan Kepala BKN				
	KPG.00.03	Persetujuan MenPan dan RB				
	KPG.00.04	Penetapan Formasi PNS				
	KPG.00.05	Penetapan Formasi Khusus	Terbatas	Escelon II	Memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	Biro Kpegawaian dan Organisasi
	KPG.01	Penerimaan/Pengadaan Pegawai Negeri				
	KPG.01.01	Proses Penerimaan Pegawai				
	KPG.01.02	Penetapan Pengumuman Kelulusan				
KPG.01.03	Berkas Lamaran yang Tidak Diterima					
KPG.01.04	Nota Usul dan Kelengkapan Penetapan NIP					
KPG.01.05	Nota Usul Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) lebih dari 2 (dua) Tahun					
KPG.01.06	Surat Keputusan CPNS/ PNS Kolektif					

No	Kode Arsip (Primer, Sekunder, Tersier)	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
	KPG.02	Pembinaan Karir Pegawai	Biasa	Eselon II	Memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	Biro Kepegawaian dan Organisasi
	KPG.02.01	Diklat/ Kursus/ Tugas Belajar/ Ujian Dinas/ Izin Belajar Pegawai				
	KPG.02.02	Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTP)/ Sertifikat				
	KPG.02.03	Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)/ Standar Kinerja Pegawai (SKP)				
	KPG.02.04	Daftar Usul Penetapan Angka Kredit				
	KPG.02.05	Berkas Disiplin Pegawai				
	KPG.02.06	Penghargaan dan Tanda Jasa				
	KPG.02.07	Satyalencana Karya Satya				
	KPG.02.08	Pengembangan karir	Biasa	Eselon II	Memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	Biro Kepegawaian dan Organisasi
	KPG.03	Penyelesaian Pengelolaan Keberatan Pegawai				

No	Kode Arsip (Primer, Sekunder, Tersier)	Jenis Arsip		Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
	KPG.04	Mutasi Pegawai		Biasa	Escion II	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	Biro Kpegawaian dan Organisasi
	KPG.04.01		Alih Status, Pindah Instansi, Pindah Wilayah Kerja, Dipertantukan, Dipekerjakan, Penugasan Sementara, Mutasi antar-Perwakilan, Mutasi ke dan dari Perwakilan, Pemindahan Sementara, Mutasi antar-Unit				
	KPG.04.02		Nota Persestuan/Pertimbangan Kepala BKN				
	KPG.04.03		Mutasi Keluar				
	KPG.04.04		U sul Kenaikan Pangkat/Golongan/Jabatan				
	KPG.04.05		U sul Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan Struktural dan Fungsional (umum dan tertentu)				
	KPG.04.06		U sul Penetapan Perubahan Data Dasar /Status/ Kedudukan Hukum Pegawai				
	KPG.04.07		Peninjauan Masa Kerja				
	KPG.04.08		Berkas Baperjakat				
	KPG.04.09		Pelantikan Jabatan				

No	Kode Arsip (Primer, Sekunder, Tersier)	Jenis Arsip		Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
	KPG.05	Administrasi Pegawai	Surat Perintah Dinas/Surat Tugas	Biasa	Escalon II	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	Biro Kpegawain dan Organisasi
	KPG.05.01		Cuti Besar				
	KPG.05.02		Cuti Sakit, Cuti Bersalin, Cuti Tahunan				
	KPG.05.03		Cuti Alasan Penting				
	KPG.05.04		Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN)				
	KPG.05.05		Dokumentasi Identitas Pegawai				
	KPG.05.06		Berkas Kpegawain dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK)				
	KPG.05.07	Berkas Pengurusan Kenaikan Gaji Berkala	Berkas Pengurusan Tunjangan Jabatan				
	KPG.05.08		Berkas Pengurusan Tunjangan Kinerja				
	KPG.05.09		Sistem Informasi Kpegawain				
	KPG.05.10	Data Pegawai	Pernyataan tidak sedang menjalani proses atau pernah pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap				
	KPG.05.11						
	KPG.05.12						
	KPG.05.13						
	KPG.05.12						

No	Kode Arsip (Primer, Sekunder, Tersier)	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
	KPG.06	Kecjahteraan Pegawai	Biasa	Escion II	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	Biro Kpegawaian dan Organisasi
	KPG.06.01	Berkas tentang Layanan Pemeliharaan Kesehatan Pegawai				
	KPG.06.02	Berkas tentang Layanan Asuransi Pegawai/BPJS				
	KPG.06.03	Berkas tentang Layanan Tabungan Perumahan				
	KPG.06.04	Berkas tentang Layanan Bantuan Sosial				
	KPG.06.05	Berkas tentang Layanan Pakaiatan Dinas				
	KPG.06.06	Berkas tentang Layanan Pegawai yang Meninggal karena Dinas				
	KPG.06.07	Berkas tentang Pemberian Tali Kasih				
	KPG.06.08	Berkas tentang Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa				
	KPG.06.09	Berkas tentang Layanan Olahraga dan Rekreasi				
	KPG.06.10	Berkas tentang Perayaan Hari Besar Nasional/Kegiatan				
	KPG.06.11	Berkas tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)				

No	Kode Arsip (Primer, Sekunder, Tersier)	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
	KPG.07	Pemberhentian Pegawai Tanpa Hak Pensiun	Biasa	Eselon II	Memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	Biro Kepegawaian dan Organisasi
	KPG.08	Perselisihan/Sengketa Pegawai	Biasa	Eselon II	Memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	Biro Kepegawaian dan Organisasi
	KPG.09	Usul Pemberhentian Dan Penetapan Pensiun Pegawai/ Jandanya/Dudanya dan PNS Yang Meninggal	Biasa	Eselon II	Memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	Biro Kepegawaian dan Organisasi

No	Kode Arsip (Primer, Sekunder, Tersier)	Jenis Arsip		Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
	KPG.10	Berkas Perscorangan Pegawai Negeri Sipil		Rahasia	Escalon II	Privasi pegawai di lingkungan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	Biro Kpegawaian dan Organisasi
	KPG.10.01	Berkas Lamaran yang Diterima					
	KPG.10.02	Nota Penetapan NIP dan Kelengkapannya					
	KPG.10.03	Nota Persetujuan/ Pertimbangan Kepala BKN					
	KPG.10.04	S.K. Pengangkatan CPNS					
	KPG.10.05	Hasil Pengujian Kesehatan					
	KPG.10.06	S.K. Pengangkatan PNS					
	KPG.10.07	S.K. Peminjauan Masa Kerja					
	KPG.10.08	S.K. Kenaikan Pangkat					
	KPG.10.09	Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas/ Menduduki Jabatan/ Surat Pernyataan Pelantikan					
	KPG.10.10	S.K. Pengangkatan dalam Jabatan atau Pemberhentian dari Jabatan Struktural dan Fungsional (umum dan tertentu)					
	KPG.10.11	S.K. Perpindahan Wilayah Kerja					
	KPG.10.12	S.K. Perpindahan antar-Instansi					
	KPG.10.13	S.K. Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN)					

No	Kode Arsip (Primer, Sekunder, Tersier)	Jenis Arsip		Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
	KPG.10.14		Berita Acara Pemeriksaan				
	KPG.10.15		S.K.Hukuman Jabatan/Hukuman Disiplin PNS				
	KPG.10.16		S.K.Perbantuan/Dipekerjakan di Luar Instansi Induk				
	KPG.10.17		S.K.Penarikan Kembali dari Perbantuan/ Dipekerjakan				
	KPG.10.18		S.K.Pemberian Uang Tungu				
	KPG.10.19		S.K.Pembebasan dari Jabatan Organik karena diangkat sebagai Pejabat Negara				
	KPG.10.20		SK. Pengalihan PNS				
	KPG.10.21		S.K.Pemberhentian sebagai PNS				
	KPG.10.22		S.K.Pemberhentian Sementara				
	KPG.10.23		Surat Keterangan Pernyataan Hilang				
	KPG.10.24		Surat Keterangan Kembalinya PNS yang dinyatakan hilang				
	KPG.10.25		S.K.Penggantian Nama				
	KPG.10.26		Surat Perbaikan Tanggal Tahun Kelahiran				
	KPG.10.27		Akta Nikah/Cerai				
	KPG.10.28		Akta Kelahiran				

No	Kode Arsip (Primer, Sekunder, Tersier)	Jenis Arsip			Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
	KPG.10.29			Isian Formulir PUPNS				
	KPG.10.30			Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji PNS dan Jabatan				
	KPG.10.31			Surat Pernohonan Menjadi Anggota Partai Politik				
	KPG.10.32			Surat Keterangan Mutasi Keluarga				
	KPG.10.33			Surat Keterangan Meninggal Dunia/Hilang				
	KPG.10.34			Surat Keterangan Peningkatan Pendidikan				
	KPG.10.35			Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional				
	KPG.10.36			Surat Keterangan Hasil Penelitian Khusus				
	KPG.10.37			Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala				
	KPG.10.38			Surat Tugas/Izin Belajar Dalam/Luar Negeri				
	KPG.10.39			Surat Izin Berpergian ke Luar Negeri				
	KPG.10.40			Kartu Pendaftaran Ulang (Kardaf) PNS				
	KPG.10.41			Ijasah/Sertifikat				

No	Kode Arsip (Primer, Sekunder, Tersier)	Jenis Arsip		Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
	KPG.10.42		S.K.Pencempatan/Penarikan Pegawai				
	KPG.10.43		S.K.Pengangkatan pada Jabatan di luar Instansi Induk				
	KPG.10.44		Surat Pertimbangan Status PNS				
	KPG.10.45		S.K.Pengaktifan Kembali Sebagai PNS				
	KPG.10.46		Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari Jabatan Organik karena dicalonkan sebagai Kepala/Wakil Kepala Daerah				
	KPG.10.47		S.K. Pensiun				Biro Kpegawaian dan Organisasi
	KPG.10.48		Surat Pernyataan Bebas Hutang Piutang				
	KPG.11		Berkas Perscorangan Pejabat Negara				
				Rahasia	Eselon II	Privasi pegawai di lingkungan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	

No	Kode Arsip (Primer, Sekunder, Tersier)	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
	KPG.12	Pegawai Kontrak	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	Biro Kepegawaian dan Organisasi
	KPG.12.01	Proses penerimaan Pegawai Kontrak				
	KPG.12.02	Kontrak Pegawai Kontrak				
	KPG.12.03	Berkas Persorangan Pegawai Kontrak				
	KPG.12.04	Pemberhentian Pegawai Kontrak				
	KPG.12.05	Pengalaman Kerja				
	KPG.13	Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi				Biro Kepegawaian dan Organisasi
	KPG.13.01	Proses Penerimaan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	

No	Kode Arsip (Primer, Sekunder, Tersier)	Jenis Arsip		Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
	KPG.13.02		Berkas Perscorangan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi	Ratasia	Escelon II	Privasi pegawai di lingkungan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	
3	PRC	PERENCANAAN					
	PRC.00		Pokok-pokok Kebijakan dan Strategi Pembangunan	Biasa	Escelon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	Biro Perencanaan dan Kerjasama
	PRC.00.01		Rencana Pembangunan Jangka Panjang/ master plan				
	PRC.00.02		Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)/ Rencana Strategis (Renstra)				
	PRC.00.03		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional				

No	Kode Arsip (Primer, Sekunder, Tersier)	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
	PRC.01	Program Kerja Tahunan	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	Biro Perencanaan dan Kerjasama
	PRC.01.01	Urusan Unit Kerja beserta Data Pendukung				
	PRC.01.02	Program Kerja Tahunan Unit Kerja				
	PRC.01.03	Program Kerja Tahunan Lembaga/Instansi				
	PRC.02	Penetapan/Kontrak Kinerja	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	Biro Perencanaan dan Kerjasama
	PRC.02.01	Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi				
	PRC.02.02	Pimpinan Unit Kerja				
			Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	Biro Perencanaan dan Kerjasama
	PRC.03	Laporan				
	PRC.03.01	Laporan Berkala				
	PRC.03.02	LAKIP				
	PRC.03.03	Laporan Insidental				

No	Kode Arsip (Primer, Sekunder, Tersier)	Jenis Arsip		Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
	PRC.04		Evaluasi Program	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	Biro Perencanaan dan Kerjasama
	PRC.04.01		Evaluasi Program Unit Kerja				
	PRC.04.02		Evaluasi Program Kementerian				
4	HKM	HUKUM					
	HKM.00		Program Legislasi	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	Biro Hukum
	HKM.00.01		Bahan/Materi Program Legislasi Nasional dari Kementerian				
	HKM.00.02		Program Legislasi Kementerian				

No	Kode Arsip (Primer, Sekunder, Tersier)	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
	HKM.01	Rancangan Peraturan Perundang- undangan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	Biro Hukum
	HKM.01.01	Rancangan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang				
	HKM.01.02	Rancangan Peraturan Pemerintah				
	HKM.01.03	Rancangan Peraturan/Instruksi Presiden				
	HKM.02	Peraturan Menteri	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	Biro Hukum
	HKM.03	Keputusan	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	Biro Hukum
	HKM.03.01	Keputusan Menteri				
	HKM.03.02	Keputusan Pejabat Setingkat Eselon I				

No	Kode Arsip (Primer, Sekunder, Tersier)	Jenis Arsip		Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
	HKM.04		Instruksi	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	Biro Hukum
	HKM.04.01		Instruksi Menteri				
	HKM.04.02		Instruksi Pejabat Setingkat Eselon I				
	HKM.05		Surat Perintah	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	Biro Hukum
	HKM.05.01		Surat Perintah Menteri				
	HKM.05.02		Surat Perintah Pejabat Setingkat Eselon I dan Eselon II				

No	Kode Arsip (Primer, Sekunder, Tersier)	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
	HKM.06	Standar/Pedoman/Prosedur Kerja/Petunjuk Pelaksanaan/ Petunjuk Teknis yang Bersifat Nasional/Regional/ Internasional	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	Biro Hukum
	HKM.07	Nota Kesepahaman (MoU)/ Kontrak/Perjanjian Kerja Sama	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	Biro Hukum
	HKM.07.01					
	HKM.07.02					
		Dalam Negeri				
		Luar Negeri				
	HKM.08	Dokumentasi Hukum	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	Biro Hukum

No	Kode Arsip (Primer, Sekunder, Tersier)	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
	HKM.09	Sosialisasi/Penyuluhan/Pembinaan Hukum	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	Biro Hukum
	HKM.09.01	Berkas yang berhubungan dengan kegiatan sosialisasi/ penyuluhan/Pembinaan Hukum	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	Biro Hukum
	HKM.09.02	Laporan Hasil Pelaksanaan				
	HKM.10	Bantuan/Konsultasi Hukum/Advokasi	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	Biro Hukum
	HKM.11	Kasus/Sengketa Hukum	Rahasia	Eselon I	Memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	Biro Hukum
	HKM.11.01					
	HKM.11.02					
	HKM.11.03					

No	Kode Arsip (Primer, Sekunder, Tersier)	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
	HKM.12	Perizinan	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	Biro Hukum
	HKM.13	Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	Biro Hukum
	HKM.13.01					
	HKM.13.02					
	HKM.13.03					
		Hak Cipta				
		Hak Paten				
		Hak Merk				
	HKM.14	Penghargaan Kelcumbagaan	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	Biro Hukum

No	Kode Arsip (Primer, Sekunder, Tersier)	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
	HKM.15	Permohonan Hak yang Ditolak	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	Biro Hukum
	HKM.15.01	Materi Rancangan Produk Hukum dan Unit Kerja Operasional				
	HKM.15.02	Proses Pembahasan Materi Produk Hukum di Tingkat Biro				
	HKM.15.03	Proses Pembahasan Materi Tingkat antar-Departemen/ Lembaga (lintas Sektor)				
	HKM.16	Surat Edaran	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	Biro Hukum
	HKM.16.01	Surat Edaran Menteri				
	HKM.16.02	Surat Edaran Pejabat Setingkat Eselon I dan Eselon II				
5	OTL	ORGANISASI DAN TATA LAKSANA				
	OTL.00	Struktur Organisasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja	Biro Kepegawaian dan Organisasi
	OTL.00.01	Pembentukan				
	OTL.00.02	Perubahan				

No	Kode Arsip (Primer, Sekunder, Tersier)	Jenis Arsip		Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
	OTL.00.03		Pembubaran			Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	
	OTL.01	Uraian Jabatan dan Tata Kerja		Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	Biro Kepegawaian dan Organisasi
	OTL.02	Standar Kompetensi Jabatan Struktural dan Fungsional		Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	Biro Kepegawaian dan Organisasi

No	Kode Arsip (Primer, Sekunder, Tersier)	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
	OTL.03	Evaluasi Kementerian	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	Biro Kepegawaian dan Organisasi
	OTL.04	Analisa Jabatan	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	Biro Kepegawaian dan Organisasi
	OTL.05	Ketatalaksanaan (SOP)	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	Biro Kepegawaian dan Organisasi

No	Kode Arsip (Primer, Sekunder, Tersier)	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
	OTL.06	Bisnis Proses	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	Biro Kepegawaian dan Organisasi
	OTL.07	Reformasi Birokrasi	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	Biro Kepegawaian dan Organisasi
	OTL.07.01	Agen Perubahan				
	OTL.07.02	Zona Integritas				
	OTL.07.03	Lembar Kerja Evaluasi (LKE)				

No	Kode Arsip (Primer, Sekunder, Tersier)	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
6	UMM	UMUM	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	Biro Umum dan Layanan Pengadaan
	UMM.00	Kearsipan				
	UMM.00.01	Administrasi Persuratan				
	UMM.00.02	Penyimpanan dan Pemeliharaan Arsip				
	UMM.00.03	Persetujuan Jadwal Retensi Arsip				
	UMM.00.04	Layanan Arsip (Peminjaman dan Penggunaan Arsip) Naskah dinas yang berkaitan dengan layanan jasa kearsipan mulai dari pelaksanaan kegiatan sampai dengan pelaporan				
	UMM.00.05	Penyusutan Kearsipan				
	UMM.00.06	Pembinaan Kearsipan				
	UMM.00.07	Risalah / Notulen Rapat				
	UMM.00.08	Audit Kearsipan Eksternal				
	UMM.00.09	Audit Kearsipan Internal				
	UMM.01	Kerumah-tanggaan				
UMM.01.01	Pendistribusian					
UMM.01.02	Telekomunikasi					
UMM.01.03	Administrasi Penggunaan Fasilitas					
UMM.01.04	Administrasi Penyediaan Konsumsi dan Akomodasi					

No	Kode Arsip (Primer, Sekunder, Tersier)	Jenis Arsip		Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
	UMM.01.05		Pengurusan Kendaraan Dinas			Transmigrasi	
	UMM.01.06		Pemeliharaan Gedung dan Taman				
	UMM.01.07		Pengelolaan Jaringan Listrik, Air, Telepon, Televisi, Kabel, dan Komputer				
	UMM.01.08		Ketertiban dan Keamanan				
	UMM.01.09		Administrasi Pengelolaan Parkir				
	UMM.01.10		Administrasi Pakaian Dinas Satpam, Petugas Kebersihan, dan Pegawai lainnya				
	UMM.01.11		Pelayanan Kesehatan				
				Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	Biro Umum dan Layanan Pengadaan
	UMM.02		Keprotokolan	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian	Biro Umum dan Layanan Pengadaan
	UMM.02.01		Penyelenggaraan Acara Kedinasan				
	UMM.02.02		Buku Tamu				
	UMM.02.03		Agenda Kegiatan Pimpinan (Menteri, Wakil Menteri dan Eselon II)				

No	Kode Arsip (Primer, Sekunder, Tersier)	Jenis Arsip		Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
	UMM.02.04		Kunjungan Dinas Dalam dan Luar Negeri			Desa, PDT, dan Transmigrasi	
	UMM.02.05		Kunjungan Dinas Eksternal/Audiensi				
	UMM.02.06		Daftar Nama/Alamat Kantor/Pejabat				
7	PBJ		PENGADAAN BARANG DAN JASA				
	PBJ.00		Layanan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	Biro Umum dan Layanan Pengadaan
	PBJ.00.01		Standarisasi Pengadaan				
	PBJ.00.02		Rencana Umum Pengadaan				
	PBJ.00.03		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan				
	PBJ.00.04		Layanan Pengaduan dan Penyelesaian Sanggah				
	PBJ.00.05		Layanan Pengelolaan Pengadaan				
	PBJ.00.06		Pengadaan Barang				
	PBJ.00.07		Pengadaan Konstruksi				
	PBJ.00.08		Pengadaan Jasa Konsultasi				
	PBJ.00.09		Pengadaan Jasa Lainnya				

No	Kode Arsip (Primer, Sekunder, Tersier)	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
	PBJ.01	Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Terbatas	Escalon II	Memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	Biro Umum dan Layanan Pengadaan
	PBJ.01.01	Pengadaan Secara Elektronik				
	PBJ.01.02	Naskah dinas yang berkaitan dengan sistem monitoring dan evaluasi pengadaan.				
	PBJ.01.03	Pengadaan Barang				
	PBJ.01.04	Pengadaan Konstruksi				
	PBJ.01.05	Pengadaan Jasa Konsultasi				
	PBJ.01.06	Pengadaan Jasa Lainnya				
8	HMS	HUMAS				
	HMS.00	Dokumentasi/Liputan	Biasa	Escalon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	Biro Humas

No	Kode Arsip (Primer, Sekunder, Tersier)	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
	HMS.01	Pengumpulan, Pengolahan, dan Penyajian Informasi Kelembagaan	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	Biro Humas
	HMS.01.01	Kliping Koran				
	HMS.01.02	Brosur/ <i>Leaflet</i> / poster/ Plakat				
	HMS.01.03	Pengumuman/Pemberitaan				
	HMS.01.04	Pengaduan Masyarakat				
	HMS.02	Hubungan antar-Lembaga Negara dan Badan Pemerintah/ Instansi	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	Biro Humas
	HMS.02.01	Hubungan antar-Lembaga Pemerintah				
	HMS.02.02	Hubungan Organisasi Sosial/ LSM				
	HMS.02.03	Hubungan dengan Perusahaan				
	HMS.02.04	Hubungan dengan Perguruan Tinggi/ Sekolah, termasuk maganng, Pendidikan Sistem Ganda (PSG)/ Praktek Kerja Lapangan (PKL)				
	HMS.02.05	Forum Kehumasan				
	HMS.02.06	Hubungan Media Massa				

No	Kode Arsip (Primer, Sekunder, Tersier)	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
	HMS.03	Rapat Kerja/ Dengar Pendapat/ Hearing DPR	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	Biro Humas
	HMS.04	Bahan/ Materi Pidato/ Sidang MPR, DPR, DPD, Kabinet, DPRD, Muspida Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	Biro Humas
	HMS.05	Penerbitan Majalah, Buletin, Koran dan Jurnal	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	Biro Humas

No	Kode Arsip (Primer, Sekunder, Tersier)	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
	HMS.06	Pameran / Sayembara / Lomba, Festival, Pembuatan Spanduk dan Iklan	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	Biro Humas
	HMS.07	Penghargaan / Tanda Kenang- kenangan	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	Biro Humas
	HMS.08	Ucapan Terima Kasih, Ucapan Selamat, dan Bela Sungkawa	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	Biro Humas

No	Kode Arsip (Primer, Sekunder, Tersier)	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
	HMS.09	Pidato/ Sambutan Pimpinan	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	Biro Humas
	HMS.09.01	Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi				
	HMS.09.02	Wakil Menteri				
	HMS.09.03	Pejabat Pimpinan Tinggi Madya				
	HMS.10	Kepustakaan	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	Biro Humas
	HMS.10.01	Penyimpanan Deposit Bahan Pustaka				
	HMS.10.02	Pengadaan dan Pengolahan Bahan				
	HMS.10.03	Layanan Jasa Perpustakaan dan Informasi				
	HMS.10.04	Preservasi Bahan Pustaka	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	Inspektorat Jenderal
9	PWS	PENGAWASAN				
	PWS.00	Rencana Pengawasan				
	PWS.00.01	Rencana Strategis Pengawasan				
	PWS.00.02	Rencana Kerja Tahunan				
	PWS.00.03	Rencana Kinerja Tahunan				
	PWS.00.04	Penetapan Kinerja Tahunan				
	PWS.00.05	Rakor Pengawasan Tingkat Nasional				

No	Kode Arsip (Primer, Sekunder, Tersier)	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
	PWS.01	Pedoman Kebijakan Pengawasan	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	Inspektorat Jenderal
	PWS.02	Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	Inspektorat Jenderal
	PWS.03	Audit				
	PWS.03.01	Audit Kinerja	Rahasia	Eselon I	Memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	Inspektorat Jenderal
	PWS.03.02	Audit dengan tujuan tertentu				
	PWS.03.03	Audit investigasi				
	PWS.03.04	Audit Operasional				
	PWS.03.05	Monthly Audit				
	PWS.03.06	Audit Lainnya				

No	Kode Arsip (Primer, Sekunder, Tersier)	Jenis Arsip		Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
	PWS.04		Reviu				
	PWS.04.01		Reviu laporan keuangan baik semesteran maupun tahunan	Rahasia	Eselon I	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	Inspektorat Jenderal
	PWS.04.02		Reviu laporan kinerja				
	PWS.04.03		Reviu RKA-KL				
	PWS.04.04		reviu Revisi DIPA/ Anggaran				
	PWS.04.05		PIPK				
	PWS.04.06		RKBMN				
	PWS.05		Evaluasi				
	PWS.05.01		SAKIP	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	Inspektorat Jenderal
	PWS.05.02		PMPRB				
	PWS.05.03		SPIP				
	PWS.05.04		Evaluasi Lainnya.				

No	Kode Arsip (Primer, Sekunder, Tersier)	Jenis Arsip		Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
	PW/S.06		Pemantauan	Rahasia	Escalon I	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	Inspektorat Jenderal
	PW/S.06.01		Pemantauan Tindak lanjut atas Rekomendasi Hasil Pengawasan				
	PW/S.06.02		Pemantauan Tindak lanjut Laporan Hasil Pengawasan				
	PW/S.06.03		Perkembangan Penyelesaian Tindak lanjut Hasil Pengawasan Internal				
	PW/S.06.04		Perkembangan Penyelesaian Tindak lanjut Hasil Pengawasan Eksternal				
	PW/S.06.05		Perkembangan Penanganan Surat Pengaduan Masyarakat Internal				
	PW/S.06.06		Perkembangan Penanganan Surat Pengaduan Masyarakat Eksternal				
	PW/S.06.07		WBS (Whistle Blowing System)				
	PW/S.06.08		Penyelesaian Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan				
	PW/S.06.09		Tuntutan Perpendaharaan				
	PW/S.06.10		Pemantauan Lainnya				

No	Kode Arsip (Primer, Sekunder, Tersier)	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
	PW.07	Pelaksanaan Pengawasan				
	PWS.07.01	Laporan Hasil Audit (LHA), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Laporan Hasil Pemeriksaan Operasional (LHPO), Laporan Hasil Evaluasi (LHE), Laporan Hasil Akuntan (LA), Laporan Auditor Independen (LAI), yang Memerlukan Tindak Lanjut (TL)	Rahasia	Eselon I	Memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	Inspektorat Jenderal
	PWS.07.02	Laporan Hasil Audit (LHA), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Laporan Hasil Pemeriksaan Operasional (LHPO), Laporan Hasil Evaluasi (LHE), Laporan Hasil Akuntan (LA), Laporan Auditor Independen (LAI), yang Tidak Memerlukan Tindak Lanjut (TL)				
	PWS.07.03	Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang Mengandung Unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan Memerlukan Tindak Lanjut (TL)	Rahasia	Eselon I	Memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	Inspektorat Jenderal

No	Kode Arsip (Primer, Sekunder, Tersier)	Jenis Arsip		Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
	PWS.07.04		Laporan Perkembangan Penanganan Surat Pengaduan Masyarakat	Rahasia	Escelon I	Memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	Inspektorat Jenderal
	PWS.07.05		Laporan Pemutakhiran Data				
	PWS.07.06		Laporan Perkembangan Barang Milik Negara	Terbatas	Escelon II	Memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	Inspektorat Jenderal
	PWS.03.07		Laporan Kegiatan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan dan Review Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	Rahasia	Escelon I	Memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	Inspektorat Jenderal

No	Kode Arsip (Primer, Sekunder, Tersier)	Jenis Arsip		Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
	PWS.07.08		Good Governance	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	Inspektorat Jenderal
			Pengawasan Lainnya	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	Inspektorat Jenderal
	PWS.09		Penerapan Early Warning System	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	Inspektorat Jenderal

No	Kode Arsip (Primer, Sekunder, Tersier)	Jenis Arsip		Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
	PWS.10		Penerapan Internal Audit Capability Model (IACM)	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	Inspektorat Jenderal
	PWS.11		Surat Keterangan/Pernyataan Bebas Temuan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	Inspektorat Jenderal
	PWS.12		Temuan Pengawasan yang Tidak Dapat Ditindaklanjuti	Rahasia	Eselon I	Memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	Inspektorat Jenderal

No	Kode Arsip (Primer, Sekunder, Tersier)	Jenis Arsip		Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
	PWS.13		Pencerapan Peta Risiko Pengawasan/Manajemen Risiko	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	Inspektorat Jenderal
	PWS.14	Piagam Pengawasan		Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	Inspektorat Jenderal
	PWS.15	Pemeriksaan Khusus		Rahasia	Eselon I	Memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	Inspektorat Jenderal

No	Kode Arsip (Primer, Sekunder, Tersier)	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
	PWS.16	Kertas Kerja Pemeriksaan, Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus	Rahasia	Eselon I	Memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	Inspektorat Jenderal
	PWS.16.01	Kertas Kerja Pemeriksaan, Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus yang Perlu Ditindaklanjuti				
	PWS.16.02	Kertas Kerja Pemeriksaan, Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus yang Tidak Perlu Ditindaklanjuti				
	PWS.17	Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Rahasia	Eselon I	Memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	Inspektorat Jenderal

No	Kode Arsip (Primer, Sekunder, Tersier)	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
	PWS.18	Satuan Pengawasan Intern (SPI) / Sistem Pengendalian Intern Pencintah (SPIP)	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	Inspektorat Jenderal
	PWS.19	Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK)	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	Inspektorat Jenderal
	PWS.20	Hasil Analisis Laporan dan Evaluasi Pengawasan	Rahasia	Eselon I	Memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	Inspektorat Jenderal

No	Kode Arsip (Primer, Sekunder, Tersier)	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
	PWS.21	Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)	Terbatas	Escion II	Memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	Inspektorat Jenderal

II. SUBSTANTIF

No	Kode Arsip (Primer, Sekunder, Tersier)	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	BLJ	KEBIJAKAN				
	BLJ.00	Penyiapan Bahan/Proses Penyusunan Kebijakan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	Biro Hukum
	BLJ.01	Penetapan dalam Bentuk Pengaturan berupa Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK)	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	Biro Hukum
2	PRI	PROGRAM PRIORITAS				
	PRI.00	Dana Desa	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja	Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan
	PRI.00.01	Padat karya tunai desa				
	PRI.00.02	Bantuan langsung tunai (BLT) dana desa				
	PRI.00.03	Desa tanggap Covid-19				

No	Kode Arsip (Primer, Sekunder, Tersier)	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
	PRI.01	Pengembangan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades)			Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	
	PRI.02	Badan Usaha Milk Desa (Bumdes)	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
	PRI.03	Embung Desa	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan
	PRI.04	Sarana Olahraga Desa				
	PRI.05	SDGs Desa				

No	Kode Arsip (Primer, Sekunder, Tersier)	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
3	PDP	PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan
	PDP.00	Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan				
	PDP.00.01	Perencanaan Teknis Pembangunan Sarana dan Prasarana				
	PDP.00.02	Perencanaan Teknis Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan				
	PDP.00.03	Perencanaan Teknis Advokasi dan Kerja Sama				
	PDP.00.04	Perencanaan Teknis Pemanfaatan dan Pengendalian Dana Desa				
	PDP.01	Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan				
	PDP.01.01	Pembangunan Sarana, Prasarana, dan Utilitas Kawasan Permukiman	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan
	PDP.01.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Konktivitas				
	PDP.01.03	Pembangunan Sarana dan Prasarana Ekonomi dan Sosial Budaya				
	PDP.01.04	Pembangunan Sarana dan Prasarana Komunikasi dan Informatika				

No	Kode Arsip (Primer, Sekunder, Tersier)	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
	PDP.02	Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan
	PDP.02.01	Pelayanan Kesehatan, Peningkatan Kesejahteraan Keluarga, dan Perlindungan Sosial				
	PDP.02.02	Pelayanan Pendidikan dan Pengembangan Modal Sosial Budaya				
	PDP.02.03	Pengembangan Desa Inklusif dan Desa Adat				
	PDP.02.04	Pengelolaan Sumber Daya Alam, Lingkungan, dan Kebencanaan	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan
	PDP.02.05	Pengembangan Ketahanan Pangan dan Ketahanan Sosial Masyarakat				
	PDP.03	Advokasi dan Kerja Sama Desa dan Perdesaan				
	PDP.03.01	Advokasi dan Diseminasi Kebijakan Pembangunan				
	PDP.03.02	Fasilitasi Pendampingan	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan
	PDP.03.03	Kerja sama Desa dan Perdesaan				
	PDP.03.04	Pembentukan dan Pengembangan Kawasan Perdesaan				

No	Kode Arsip (Primer, Sekunder, Tersier)	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
	PDP.04	Facilitasi dan Pemanfaatan Dana Desa	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan
	PDP.04.01	Penyusunan Rencana Prioritas Pemanfaatan dana Desa				
	PDP.04.02	Penyusunan Rencana Pemanfaatan Dana Desa secara Partisipatif				
	PDP.04.03	Pelaksanaan Pemanfaatan Dana Desa				
	PDP.04.04	Pengelolaan Sistem Informasi Dana Desa				
4	PEI	PENGEMBANGAN EKONOMI DAN INVESTASI DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI				
	PEI.00	Perencanaan Teknis Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
	PEI.00.01	Perencanaan Teknis Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi				
	PEI.00.02	Perencanaan Teknis Pelayanan Investasi				
	PEI.00.03	Perencanaan Teknis Pengembangan Produk Unggulan				
	PEI.00.04	Perencanaan Teknis Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan				

No	Kode Arsip (Primer, Sekunder, Tersier)	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
	PEI.01	Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
	PEI.01.01	Pengembangan Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
	PEI.01.02	Pengembangan Badan Pengelola Kawasan				
	PEI.01.03	Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Masyarakat				
	PEI.01.04	Pengembangan Kelembagaan Investasi				
	PEI.02	Pelayanan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
	PEI.02.01	Pelayanan Informasi Potensi Investasi	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
	PEI.02.02	Pelayanan Perijinan				
	PEI.02.03	Akses Permodalan				
	PEI.02.04	Pengembangan Kewirausahaan				

No	Kode Arsip (Primer, Sekunder, Tersier)	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
	PE1.03	Pengembangan Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
	PE1.03.01	Pengembangan Produk Unggulan				
	PE1.03.02	Pengembangan Sarana dan Prasarana Produksi, dan Pengembangan Teknologi Produk Unggulan				
	PE1.03.03	Pengembangan Rantai Pasok dan Rantai Nilai Produk Unggulan				
	PE1.03.04	Pengembangan Pembiayaan Produk Unggulan				
	PE1.04	Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
	PE1.04.01	Pengembangan Strategi Pemasaran				
	PE1.04.02	Pengembangan Jaringan dan Kerja Sama Pemasaran				
	PE1.04.03	Pengembangan Promosi Kawasan dan Produk Unggulan				
	PE1.04.04	Pengembangan Pemasaran Produk Unggulan				
	PE1.04.05	Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu				

No	Kode Arsip (Primer, Sekunder, Tersier)	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
5	PDT	PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL				
	PDT.00	Penyerasian Rencana dan Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal
	PDT.00.01	Penyerasian Rencana dan Program Pembangunan Sosial Budaya dan Kelembagaan				
	PDT.00.02	Penyerasian Rencana dan Program Pembangunan Sarana dan Prasarana				
	PDT.00.03	Penyerasian Rencana dan Program Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan				
	PDT.00.04	Penyerasian Rencana dan Program Pembangunan Daerah Khusus				

No	Kode Arsip (Primer, Sekunder, Tersier)	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
	PDT.01	Penyerasian Sosial Budaya dan Kelembagaan Daerah Tertinggal	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal
	PDT.01.01	Penyerasian Pembangunan Modal Sosial Dan Kelembagaan				
	PDT.01.02	Penyerasian Pembangunan Modal Budaya				
	PDT.01.03	Penyerasian Pembangunan Kesehatan, Gizi Keluarga dan Masyarakat				
	PDT.01.04	Penyerasian Pembangunan Pendidikan Dasar dan Menengah				
	PDT.02	Penyerasian Pembangunan Sarana dan Prasarana	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal
	PDT.02.01	Penyerasian Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi Energi dan Air				
	PDT.02.02	Penyerasian Pembangunan Sarana dan Prasarana Sosial Budaya dan Kelembagaan				
	PDT.02.03	Penyerasian Pembangunan Sarana dan Prasarana Komunikasi dan Informatika				
	PDT.02.04	Penyerasian Pembangunan Sarana dan Prasarana Permukiman, dan Sanitasi Lingkungan				

No	Kode Arsip (Primer, Sekunder, Tersier)	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
	PDT.03	Penyerasian Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal
	PDT.03.01	Penyerasian Pemanfaatan Sumber Daya Alam Terbarukan				
	PDT.03.02	Penyerasian Pemanfaatan Sumber Daya Alam Non Terbarukan				
	PDT.03.03	Penyerasian Pengelolaan Kebencanaan				
	PDT.03.04	Penyerasian Adaptasi Iklim dan Pengelolaan Lingkungan				
	PDT.04	Penyerasian Pembangunan Daerah Khusus	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal
	PDT.04.01	Penyerasian Pembangunan Kawasan Perbatasan				
	PDT.04.02	Penyerasian Pembangunan Pulau- Pulau Kecil dan Pulau Terluar				
	PDT.04.03	Penyerasian Pembangunan Kawasan Strategis				

No	Kode Arsip (Primer, Sekunder, Tersier)	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
6	PKT	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI				
	PKT.00	Percencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi				
	PKT.00.01	Penyusunan Rencana Rinci Satuan Kawasan Pengembangan Kawasan dan Rencana Detail Kawasan Perkotaan Baru	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transigrasi
	PKT.00.02	Legalisasi Tanah	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transigrasi

No	Kode Arsip (Primer, Sekunder, Tersier)	Jenis Arsip		Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
	PKT.00.03		Penyusunan Rencana Teknis Satuan Permukiman dan Rencana Teknis Pusat Satuan Kawasan Pengembangan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transigrasi
	PKT.00.04		Penyusunan Rencana Teknis Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transigrasi
	PKT.01		Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transigrasi
	PKT.01.01		Pembangunan Satuan Permukiman				
	PKT.01.02		Pembangunan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan				
	PKT.01.03		Pembangunan Kawasan Perkotaan Baru				
	PKT.01.04		Evaluasi Kelayakan Permukiman dan Perwujudan Ruang				

No	Kode Arsip (Primer, Sekunder, Tersier)	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
	PKT.02	Facilitasi Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transigrasi
	PKT.02.01	Penyiapan Calon Transmigran				
	PKT.02.02	Mediasi Kerja Sama Antar Daerah dan Persiapan Perpidahan Transmigrasi				
	PKT.02.03	Perpindahan dan Penempatan Transmigran				
	PKT.02.04	Penataan Penduduk Setempat				
	PKT.02.05	Konsolidasi dan Adaptasi Lingkungan	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transigrasi
	PKT.03	Pengembangan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan				
	PKT.03.01	Pengembangan Sosial Budaya dan Mental Spiritual				
	PKT.03.02	Pengembangan Usaha dan Kelembagaan				
	PKT.03.03	Pengembangan Sarana, Prasarana dan Utilitas Umum serta Pengelolaan Lingkungan				
	PKT.03.04	Facilitasi Pengurusan Hak Atas Tanah				
	PKT.03.05	Advokasi Pertanahan				

No	Kode Arsip (Primer, Sekunder, Tersier)	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
	PKT.04	Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transigrasi
	PKT.04.01	Pengembangan Masyarakat				
	PKT.04.02	Pengembangan Konktivitas				
	PKT.04.03	Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Lingkungan				
	PKT.04.04	Evaluasi Perkembangan Kawasan Transmigrasi				
	PKT.04.05	Pengelolaan Aset Kawasan Transmigrasi				
7	BPI	BADAN PENGEMBANGAN DAN INFORMASI DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI				
	BPI.00	Pusat Pengembangan Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
	BPI.00.01	Kebijakan Pembangunan Desa dan Perdesaan				
	BPI.00.02	Kebijakan Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Perdesaan, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi				
	BPI.00.03	Kebijakan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal				

No	Kode Arsip (Primer, Sekunder, Tersier)	Jenis Arsip		Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
	BPl.00.04		Kebijakan Pembangunan Transmigrasi				
	BPl.01		Pengembangan Daya Saling Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
	BPl.01.01		Pengembangan Kreativitas dan Inovasi				
	BPl.01.02		Pengembangan Teknologi Tepat Guna				
	BPl.01.03		Pengembangan Teknologi Tinggi				
	BPl.01.04		Pengembangan teknologi Digital				
	BPl.02		Pusat Penyusunan Keterpaduan Rencana Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
	BPl.02.01		Penyusunan Keterpaduan Rencana Pembangunan Desa dan Perdesaan				
	BPl.02.02		Penyusunan Keterpaduan Rencana Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Perdesaan, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi				
	BPl.02.03		Penyusunan Keterpaduan Rencana Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal				

No	Kode Arsip (Primer, Sekunder, Tersier)	Jenis Arsip		Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
	BPl.02.04		Penyusunan Keterpaduan Rencana Pembangunan Transmigrasi				
	BPl.03		Pusat Data dan Informasi Pembangunan desa, Daerah Tertinggal dan transmigrasi	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
	BPl.03.01		Pengembangan Sistem Informasi				
	BPl.03.02		Pengelolaan Teknologi Informasi				
	BPl.03.03		Pengelolaan Data dan Informasi				
	BPl.03.04		Pengembangan Kerja Sama Data dan Informasi				
8	SDM	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA. DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI					
	SDM.00		Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
	SDM.00.01		Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat				
	SDM.00.02		Pengembangan Sistem dan Model Pemberdayaan Masyarakat				
	SDM.00.03		Pengembangan Sistem Pelayanan Pendampingan Masyarakat				

No	Kode Arsip (Primer, Sekunder, Tersier)	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
	SDM.01	Pelatihan Sumber Daya Manusia Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat De sa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
	SDM.01.01	Penyusunan Rencana dan Program Pelatihan Sumber Daya Manusia				
	SDM.01.02	Pengembangan Kelembagaan dan Tenaga Pelatihan				
	SDM.01.03	Pengembangan Standarisasi dan Sertifikasi Profe si				
	SDM.01.04	Pengembangan Kerja Sama Pelatihan				
	SDM.02	Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat De sa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
	SDM.02.01	Penyusunan Rencana dan Program Pelatihan				
	SDM.02.02	Penyelenggaraan Pelaksanaan Pelatihan				
	SDM.02.03	Pengembangan Kelembagaan dan Tenaga Pelatih				
	SDM.02.04	Pengembangan Kerja Sama Pelatihan				

No	Kode Arsip (Primer, Sekunder, Tersier)	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
	SDM.03	Pembinaan Jabatan Fungsional				
	SDM.03.01	Rencana dan Program Pengembangan Jabatan Fungsional	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
	SDM.03.02	Pengembangan Standarisasi Kompetensi				
	SDM.03.03	Pengembangan Profesi, Sertifikasi Kelembagaan dan Jabatan Fungsional				
	SDM.03.04	Evaluasi dan Penilaian Jabatan Fungsional	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional
	SDM.04	Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
	SDM.04.01	Perencanaan dan Program Pengembangan fasilitasi dan pelatihan masyarakat				
	SDM.04.02	Pelaksanaan fasilitasi dan pelatihan pengembangan Sumber Daya Manusia				

No	Kode Arsip (Primer, Sekunder, Tersier)	Jenis Arsip		Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
	SDM.04.03		Pemantauan, evaluasi dan pelaporan fasilitasi				

BAB V
PENUTUP

Demikian Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi ini disusun untuk dijadikan acuan oleh unit kerja di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam melakukan pengelolaan arsip dinamis dan digunakan sebagai dasar untuk melindungi informasi dari akses oleh pihak yang berhak.

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDUL HALIM ISKANDAR